Analisis Pembangunan Infrastruktur Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tasikmalaya

SKRIPSI

Oleh :

Nama : Moh Abby Bhakti Utama

Nomor Mahasiswa : 14313019

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2018

Analisis Pembangunan Infrastruktur Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tasikmalaya

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi syarat ujian akhir guna memperoleh gelar sarjana strata 1 Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

Oleh :

Nama : Moh Abby Bhakti Utama

Nomor Mahasiswa : 14313019

Program Studi : Ilmu Ekonomi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS EKONOMI YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang dapat dikategorikan dalam tindakan plagiasi seperti dimaksud dalam buku pedoman penulisan skripsi Program Studi Ilmu Ekonomi FE UII. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka Saya sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, 4 April 2018

Penulis



Moh Abby Bhakti Utama

PENGESAHAN SKRIPSI

Analisis Pembangunan

Infrastruktur Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Di Kabupaten Tasikmalaya

Nama	: Moh Abby Bhakti Utama
Nomor Mahasiswa	: 14313019
Program Studi	: Ilmu Ekonomi

Yogyakarta, 4 April 2018

Telah disetujui dan disahkan oleh

Dosen Pembimbing,

Acc diujikan 16/5/2018

Sahabudin Sidiq, SE., MA

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TASIKMALAYA

Disusun Oleh : MOH ABBY BHAKTI UTAMA

Nomor Mahasiswa : 14213019

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan LULUS

Pada hari Kamis, tanggal: 7 Juni 2018

Penguji/ Pembimbing Skripsi : Sahabudin Sidiq, Dr., SE., M.A. .....

Penguji : Indah Susantun, Dra., M.Si. .....

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Dr. D. Agus Harjito, M.Si.

MOTTO

“ *Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan pun hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja* ” (Buya Hamka)

“ *Segala sesuatu yang bisa kau bayangkan adalah nyata* “ (Pablo Picasso)

“ Jalani, Hadapi, dan Nikmati “

“ Aya kahayang bari jeung teu dibarengan ku usaha mah sarua jeung ngbodor “

“ Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik “ (HR Thabrani)

“ Barang siapa merasa letih dimalam hari karena ia bekerja, maka dimalam itu ia diampuni “ (HR Ahmad)

“ Sesungguhnya orang yang menunjukan kebaikan mendapat pahala sama dengan orang yang melakukannya “ (HR Tirmidzi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikan kekuatan, membekali dengan ilmu serta memperkenalkannya dengan cinta. Syukur tiada henti yang selalu penulis panjatkan atas ridho, rahmat, dan hidayah-Nya. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada:

- Terimakasih kepada Allah SWT
- Terimakasih kepada Nabi Muhammad SAW
- Terimakasih kepada Bapak Sahabudin Sidiq yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
- Terimakasih kepada kedua orang tua saya yang selalu mendoakan dan mengingatkan untuk menyelesaikan skripsi ini.
- Terimakasih kepada teman-teman yang mendukung dan memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan taufik, inayah serta hidayah-Nya yang tiada ternilai dan tak tertandingi kepada hamba-hamba-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Perkenankan penulis menyampaikan ucapan terimakasih atas dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang ikut membantu dalam proses penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: "Analisis Pembangunan Infrastruktur Daerah Terdahap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tasikmalaya", semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi program strata satu Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dalam penyususnan laporan penelitian ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan kelemahan, sehingga segala bentuk kritik dan saran yang mambangun sangat diharapkan penulis demi kesempurnaan laporan penelitian ini. Semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi dari penulis dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak dibantu oleh beberapa pihak, maka dengan penuh ketulusan penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan.
2. Terimakasih kepada Bapak Sahabudin Sidiq selaku dosen pembimbing dalam penulisan skripsi ini, atas bantuan, kesabaran, dan nasihat yang Bapak berikan. Terimakasih juga untuk semua ilmu, didikan, dan pengalaman yang sangat berarti yang telah Bapak berikan kepada saya.
3. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terimakasih yang tiada henti-hentinya. Hanya karya kecil ini kepada Mamah dan Ayah yang telah memberikan semangat dan doa yang tiada mungkin dapat dibalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat bahagia Mamah dan Ayah. Semoga kedepannya dengan doa dan kasih sayang yang selalu diberikan oleh Mamah dan Ayah saya dapat membuat karya yang lebih besar lagi.
4. Terimakasih kepada kakak dan adik-adik saya, hal yang paling menyenangkan saat pulang ke Tasik yaitu berkumpul bersama kalian, walaupun sering bertengkar tapi hal itu selalu menjadikan warna yang tak akan tergantikan. Maaf jika selama ini belum bisa menjadi panutan

seutuhnya, tapi saya akan selalu menjadi yang terbaik untuk kalian semua.

5. Terimakasih kepada Ratih Pertiwi, Terimakasih atas kasih sayang, perhatian, dan kesabarannya yang telah memberikan semangat dan inspirasi dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga engkau pilihan yang terbaik buatku dan masa depanku.
6. Terimakasih kepada teman-teman sekosan yaitu Bimo, Niko, dan El. Hanya karya kecil ini untuk kalian karena kalian lah yang selalu memberikan saran dan support kepada saya
7. Terimaksih kepada teman-teman dekat saya seperti Akbar, Tyo, Satrio, Saeful, Hesti, Ifan yang selalu mendukung dan memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada teman-teman KKN unit 67 yang telah mensupport saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia yang telah mengajarkan ilmu yang tidak ternilai, hingga penulis menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi Prodi Ilmu Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
10. Terimakasih juga kepada mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2014 yang banyak berbagi informasi dan membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga kebaikan dari semua pihak dapat

diterima oleh Allah SWT serta mendapatkan pahala yang berlipat dari-Nya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa *"Tak ada gading yang tak retak"* dan *"Tak ada mawar yang tak berduri"*, penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kritik serta saran yang konstruktif sangat penulis harapkan.

Yogyakarta, 4 April 2018

Penulis

Moh Abby Bhakti Utama

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**

HALAMAN JUDUL ..... **ii**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iv**

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI ..... **v**

MOTTO ..... **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ..... **vii**

KATA PENGANTAR ..... **viii**

DAFTAR ISI ..... **xii**

DAFTAR GAMBAR ..... **xv**

DAFTAR TABEL ..... **xvi**

DAFTAR GRAFIK ..... **xvii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xviii**

ABSTRAK ..... **xix**

BAB I. PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Perumusan Masalah 5

1.3 Tujuan Penelitian 6

1.4 Manfaat Penelitian 6

BAB II. KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI **8**

2.1 Kajian Pustaka 8

2.2 Landasan Teori 11

2.2.1 Pemerintahan Daerah 11

2.2.2 Otonomi Daerah 14

2.2.3 Pendapatan Asli Daerah 18

2.2.3.1 Pajak Daerah 19
2.2.3.2 Retribusi Daerah..... 21
2.2.3.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 22
2.2.3.4 Pos-pos Lain Pendapatan 22
2.2.4 Infrastruktur Daerah 23
2.3 Kerangka Pemikiran..... 25
2.4 Hipotesis 26
BAB III. METODE PENELITIAN 27
3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data 27
3.2 Definisi Operasinal Variabel..... 27
3.2.1 Variabel Dependen..... 28
3.2.2 Variabel Independen 28
3.3 Metode Analisis Data..... 29
3.3.1 Uji Stasioneritas 29
3.3.2 Uji Kointegrasi 30
3.3.3 *Error Correction Model (ECM)*..... 30
3.3.4 *Error Correction Terms (ECT)* 32
3.3.5 Uji Asumsi Klasik 32
a. Uji Autokorelasi 32
b. Uji Heterokedastisitas 33
c. Uji Multikolineritas 33
d. Uji Normalitas..... 34
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN..... 35
4.1 Diskripsi Data Penelitian..... 35
4.2 Analisis Model ECM..... 35
4.2.1 Uji Stasioneritas 35

4.2.2 Uji Kointegrasi 37
4.2.3 Analisis Regresi Jangka Panjang PAD 38
4.2.4 Analisis Regresi Jangka Pendek PAD..... 40
4.2.5 Uji Asumsi Klasik 42
a. Uji Autokorelasi 42
b. Uji Heterokedastisitas 43
c. Uji Multikolineritas 43
d. Uji Normalitas 44
4.3 Interpretasi Analisis Ekonomi 44
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 49
5.1 Kesimpulan 49
5.2 Saran..... 51
DAFTAR PUSTAKA 53
LAMPIRAN 56

DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar Kerangka Pemikiran Penelitian 25

DAFTAR TABEL

4.1 Tabel Hasil Pengujian Akar Unit 36

4.2 Tabel Hasil Uji Kointegrasi PAD 37

4.3 Tabel Hasil Regresi Jangka Panjang PAD 38

4.4 Tabel Hasil Regresi Jangka Pendek PAD 40

4.5 Tabel Hasil Uji Autokorelasi PAD 42

4.6 Tabel Hasil Uji Diferensi Autokorelasi PAD 42

4.7 Tabel Hasil Uji Heterokedastisitas PAD 43

DAFTAR GRAFIK

1.1 Grafik Penerimaan PAD Kab. Tasikmalaya 3

1.2 Grafik Pengeluaran Infrastruktur Kab.Tasikmalaya 4

4.8 Grafik Hasil Uji Normalitas 44

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Data PAD, Pembangunan Kesehatan, Pembangunan Pertanian, Pembangunan Binamarga, Pembangunan Pariwisata 57

Lampiran II Uji Akar Unit Root pada Residual pada Tingkat Level..... 58

Lampiran III Uji Akar Unit Root pada Residual pada Tingkat First Difference..... 59

Lampiran IV Uji Kointegrasi 60

Lampiran V Hasil Error Correction Terms pada Tingkat Level 63

Lampiran VI Hasil Uji Penyembuhan Autokorelasi Dengan Diferensi Autokorelasi 64

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jangka panjang dan jangka pendek yang terjadi antara Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten Tasikmalaya. Data yang diperoleh yaitu dari salah satu sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Pembangunan Infrastruktur fasilitas daerah yang dilaksanakan selama enam tahun yaitu dari tahun 2011-2016. Hasil analisis ECM menunjukan bahwa pada jangka panjang pembangunan infrastruktur jalan, infrastruktur pariwisata, infrastruktur pertanian lebih berkontribusi pada penerimaan pendapatan asli daerah sedangkan infrastruktur kesehatan tidak berkontribusi pada penerimaan pendapatan asli daerah. Pada jangka pendek pembangunan infrastruktur pariwisata dan infrastruktur pertanian lebih berkontribusi pada penerimaan pendapatan asli daerah sedangkan pembangunan infrastruktur jalan dan infrastruktur kesehatan tidak berkontribusi pada penerimaan pendapatan asli daerah.

Kata Kunci : Pembangunan Infrastruktur, Pendapatan Asli Daerah, dan ECM.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah pada dasarnya merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya salah satu tujuan Negara, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan pelaksanaan pembangunan dan hasil-hasilnya. Tujuan otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah dalam mengurus dan mengatur rumah tangganya agar berdaya guna dan berhasil dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, namun permasalahan yang sering dihadapi daerah dalam pelaksanaan pembiayaan pembangunan adalah kecilnya proporsi dana pembangunan yang berasal dari kewenangan otonomi daerah. Pemberian otonomi daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi untuk suatu daerah karena memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerah Putro (2011). Oleh karena itu diperlukan wawasan akan pembangunan untuk mencapai sasaran dan meningkatkan taraf hidup serta kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan daerah dan pembangunan daerah itu sendiri bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Susanto (2005).

Sumber dana daerah tidak hanya bergantung pada APBD dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur, sektor swasta adalah salah satu komponen yang sangat diperlukan untuk menambah anggaran pembangunan

infrastruktur karena keterlibatan sektor swasta diasumsikan akan mendorong pembangunan ekonomi ke arah yang lebih cepat dan baik Adam (2014). Pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, sumber pendapatan daerah diperoleh salah satunya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pos-pos pendapatan lain-lain yang sah.

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan dampak baik dalam kemampuan keuangan dan kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber keuangan dalam pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan suatu daerah. Di samping itu semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka semakin kecil pula ketergantungan terhadap bantuan pemerintah pusat atau dengan kata lain mewujudkan kemandirian daerah sesuai dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah.

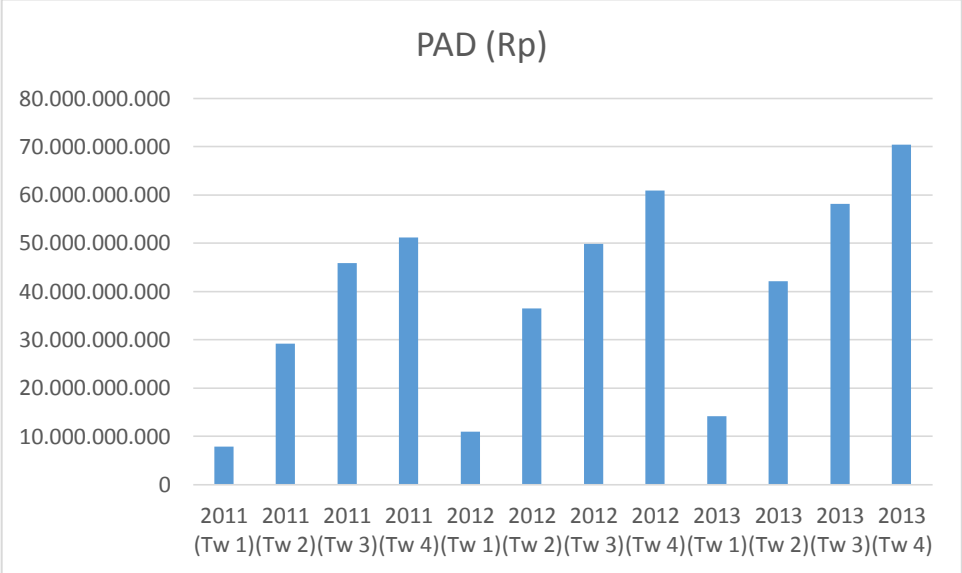
Kabupaten Tasikmalaya adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kota Tasikmalaya di bagian utara, di daerah selatan samudra hindia, di daerah timur Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran, di daerah barat Kabupaten Garut. Luas Wilayah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebesar 2.708,81 Km2 atau 270.881Ha, secara administratif terdiri dari 39 kecamatan dan 351 desa. Jumlah penduduk Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2014 berjumlah 1.728.618

jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 0,88% dan tingkat kepadatan penduduk rata-rata 638 jiwa/Km2.

Tasikmalaya umumnya bertumpu pada sektor pertanian, pertenakan, perikanan, perdagangan, industri olahan dan pertambangan seperti pasir Galunggung yang memiliki kualitas cukup baik bagi bahan bangunan, industri, dan perdagangan. Kabupaten Tasikmalaya memiliki berbagai tempat wisata seperti Kampung Naga, Gunung Galunggung, Pantai Cipatujah, Pantai Sindangkerta, dan Pantai Karang tawulan serta kerajinan di daerah Rajapolah yang terkenal dengan kerajinan anyaman seperti tikar, anyaman dari bambu, mendongan, perabotan rumah tangga, payung tasik, kelom geulis dan batik tulis.

Kontribusi realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tasikmalaya selama tiga tahun terakhir dengan menggunakan data Triwulan dapat dilihat melalui grafik berikut:

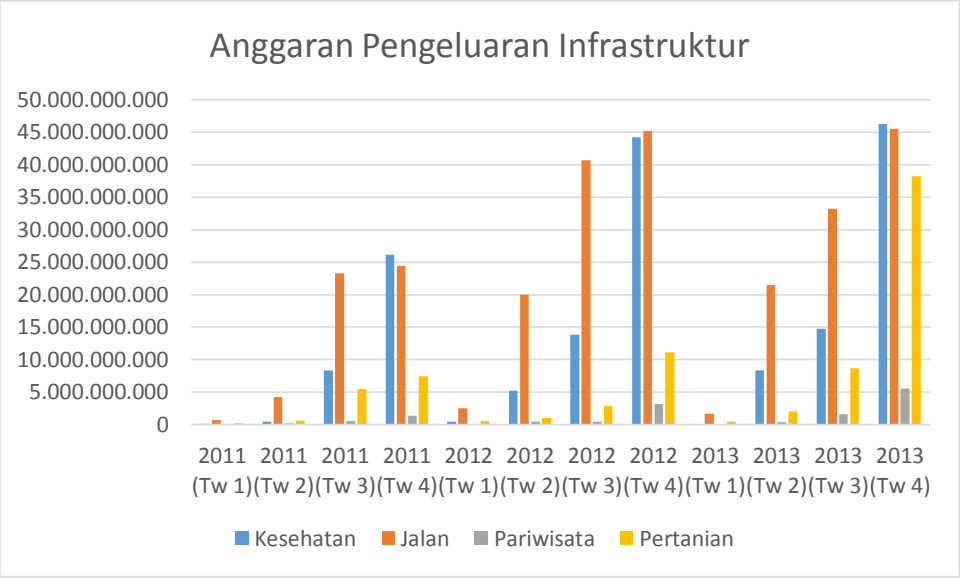
Grafik 1.1 Penerimaan PAD Kab. Tasikmalaya



Pada grafik diatas penerimaan PAD di Kabupaten Tasikmalaya menunjukan peningkatan setiap triwulannya. Kondisi ini dapat dikatakan hasil dari setiap sektor yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dapat berkontribusi terhadap PAD.

Peran infrastruktur sebegai penggerak perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnnya sektor-sektor yang terkait. Selain itu infrastruktur juga berperan dalam memberikan kontribusi terhadap PAD. Berikut ini merupakan grafik sektor infrastruktur yang berperan terhadap penerimaan PAD selama tiga tahun terakhir dengan menggunakan data Triwulan:

Grafik 1.2 Pengeluaran Infrastruktur Kab. Tasikmalaya



Dari grafik diatas menunjukan jumlah pengeluaran yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur, pada setiap triwulannya jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan. Pengeluaran yang paling besar terlihat pada sektor Kesehatan dan Jalan.

Peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur di Kabupaten Tasikmalaya diharapkan mampu untuk meningkatkan kondisi perekonomian. Meningkatnya kondisi pembangunan daerah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan terciptanya efisiensi dalam kegiatan perekonomian. Oleh karena itu dalam upaya pembangunan ekonomi, pengembangan sektor infrastruktur perlu diperhatikan mengingat begitu pentingnya infrastruktur bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu perlu adanya analisis mengenai perkembangan infrastruktur untuk mencapai keberhasilan pembangunan tersebut. Dengan adanya peningkatan pengeluaran pada pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, apabila infrastrukturnya tersebut dikelola dengan baik dan dapat dirasakan penggunaannya oleh masyarakat maka dapat dijadikan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari hal ini, penulis melakukan penelitian dengan judul: **"Analisis Pembangunan Infrastruktur Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Tasikmalaya".**

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh dari Pembangunan Infrastruktur Kesehatan dalam jangka panjang dan jangka pendek terhadap Pendapatan Asli Daerah?
2. Bagaimana pengaruh dari Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam jangka panjang dan jangka pendek terhadap Pendapatan Asli Daerah?
3. Bagaimana pengaruh dari Pembangunan Infrastruktur Pariwisata dalam jangka panjang dan jangka pendek terhadap Pendapatan Asli Daerah?

4. Bagaimana pengaruh dari Pembangunan Infrastruktur Pertanian dalam jangka panjang dan jangka pendek terhadap Pendapatan Asli Daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Pembangunan Infrastruktur Kesehatan dalam jangka panjang dan jangka pendek terhadap Pendapatan Asli Daerah.
2. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan dalam jangka panjang dan jangka pendek terhadap Pendapatan Asli Daerah.
3. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pariwisata dalam jangka panjang dan jangka pendek terhadap Pendapatan Asli Daerah
4. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Pembangunan Infrastruktur Pertanian dalam jangka panjang dan jangka pendek terhadap Pendapatan Asli Daerah

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

   Untuk mengetahui suatu daerah membangun infrastruktur daerahnya demi kemajuan daerahnya dari sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dan sebagai penambahan ilmu diluar pelajaran yang ada di perkuliahan.
2. Bagi Masyarakat

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan masyarakat mengetahui bagaimana dan darimana sebuah daerah mendapatkan pemasukan dalam mengembangkan infrastruktur daerahnya, sehingga masyarakat lebih mampu membantu Pemerintah Daerah untuk memaksimalkan pendapatannya.

3. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya

   Memberikan informasi mengenai seberapa besar pengaruh antara Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah dan seberapa kuat pengaruh yang terjadi diantara keduanya sehingga dapat dilakukan perbaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan kumpulan dari beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang ada kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan ini. Hasil-hasil penelitian terdahulu ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang akan dilakukan.

Putro (2011), tentang penelitiannya mengenai "Pengaruh Pertumbuhun Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Study Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah)" menerangkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan pendapatan asli daerah tidak mempunyai pengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal sedangkan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Suratno Putro adalah petumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum sebagai variabel dependen dan belanja modal sebagai sebagai variabel independen sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan pendapatan asli

daerah sebagai variable dependen dan infrastruktur pembangunan daerah sebagai variabel independen.

Soamale (2013), tentang penelitiannya mengenai "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Study Di Kabupaten Kepulauan Sula) " menerangkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif sebesar 0,63% terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Kepulauan Sula dan PDRB berpengaruh positif dan signifikan sebesar 0,02% terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Sula. Perbedaan penelitian yang dilakukan Mulyadi Soamale dengan yang dilakukan oleh penulis adalah Mulyadi Soamale meneliti mengenai factor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pemerintah dan PDRB terhadap pendapatan asli daerah dalam pembangunan daerah sedangkan penelitian yang dilakukan penulis melihat pengaruh pembangunan infrastrukutr daerah pada penerimaan daerah yaitu pendapatan asli daerah.

Purpitasari (2015), tentang penelitiannya mengenai "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokas Belanja Daerah" menerangkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap belanja daerah, hal ini memperkuat bahwa semakin tinggi pendapatan asli daerah yang didapat maka pengeluaran pemerintah atas belanja akan semakin tinggi sedangkan dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja daerah, hal ini menunjukan semakin tinggi dana alokasi umum yang diberikan pemerintah pusat maka pengeluaran pemerintah atas belanja daerah akan semakin tinggi. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Puput Puspitasari dengan yang dilakukan oleh penulis adalah Puput Puspitasari meneliti mengenai pengaruh pendapatan asli

daerah dan dana alokasi umu terhadap belanja modal daerah sedangkan yang dilakukan oleh penulis melihat dari sisi kontribusi pembangunan infrastruktur daerah terhadap pendapatan asli daerah

Khalistyowati (2017), tentang penelitiannya mengenai "Analisis Korelasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dengan Infrastruktur Pembangunan Daerah" menerangkan bahwa penelitian dilakukan selama tiga tahun dari 2007 hingga 2009 hubungan secara keseluruhan selama tiga tahun menunjukan pendapatan asli daerah dengan infrastruktur pembangunan daerah sangat rendah yaitu sebesar 0,048%. Perbedaan penelitian Khalistyowati dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian Khalistyowati berstudy di Kabupaten Pemalang sedangkan penulis melakukan penelitian di Kabupaten Tasikmalaya dan yang digunakan oleh penulis selama 6 tahun dari 2011 hingga 2016 dan penulis menggunakan data infrstruktur fisik dan non fisik sedangkan penelitian yang dilakuka Khalistyowati hanya menggunakan infrastruktur non fisik.

Hari (2004), tentang penelitiannya mengenai "Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan, dan PAD" menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah mempunyai dampak yang signifikan terhadap peningkatan PAD dan penerimaan yang menjadi andalan adalah retribusi dan pajak daerah. Tingginya retribusi dapat menjadi itikad pemerintah untuk memberikan layanan public yang lebih berkualitas. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hari dengan penelitian sekarang adalah tidak meneliti pertumbuhan ekonomi daerah.

Fauji (2017), tentang penelitiannya mengenai "Pengaruh Belanja Bidang Infrastruktur, Pendidikan, Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung" menjelaskan bahwa variabel belanja pemerintah bidang pendidikan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan variabel belanja pemerintah bidang infrastruktur dan kesehatan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fauji dengan penelitian sekarang adalah fauji menggunkaan variabel belanja bidang infrastruktur secara garis besar dan menggunakan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen sedangkan penulis menggunakan bidang infrastruktur pariwisata, pertanian, jalan, dan kesehatan dengan variabel dependen PAD.

Jokosiswaya (2007), tentang penelitiannya mengenai "Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus di Kabupaten Klaten" menjelaskan pada tahun 2001-2006 kontribusi sector pertanian terbesar terhadap PAD pada tahun 2002 sebesar 1,5720% dan yang terendah pada tahun 2006 sebesar 0,7961% . Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Jokosiswaya dengan penelitian sekarang yaitu Jokosiswaya berfokuskan pada hasil dari sector pertanian terhadap penerimaan PAD sedangkan penulis menggunakan sektor pariwisata, sektor kesehatan, sektor jalan, dan sector pertanian dalam penerimaan PAD.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 Pemerintahan Daerah

Menurut peraturan undang-undang nomor 23 tahun 2014, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan untuk kewenangan daerah otonom. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan pusat adalah presiden memegang kekuasan pemerintahan Negara Indonesia dan dibantu oleh wakil presiden dan para menteri yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemerintahan dalam suatu daerah terbagi menjadi:

1. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi.
2. Pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintahan daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota

Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan dari beberapa daerah atau bagian daerah yang mengalami pemekaran menjadi dua daerah atau lebih. Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah. Penghapusan dan penggabungan daerah ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam

wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan eksternalitas, akuntabilitas, dan efesiensi dengan memperhatikan hubungan susunan pemerintahan. Mengeni pengaturan teknis untuk masing-masing sub bidang urusan pemerintahan diatur dengan peraturan menteri/kepala lembaga pemerintahan non departemen yang membidangi urusan pemerintahan yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan menteri dalam negeri. Pemerintah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah diselenggarakan berdasarkan urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Pemerintah daerah memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lainnya, hubungan tersebut dapat meliputi hubungan kewewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, hubungan keuangan yang mencakup pendapatan

daerah yang termasuk pula dalam pendapatan dari pemerintah pusat, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya, dan hubungan tersebut harus dilaksanakan secara adil dan selaras.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan oleh para Menteri Negara. Untuk pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan pemerintah daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Di dalam otonomi, daerah mempunyai hak dan kewajiban dalam mengelola dan mengembangkan daerahnya menjadi daerah yang berkembang. Dengan adanya otonomi daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiyaan pengeluaran dan untuk pembangunan daerah. Menurut hak dan kewajiban tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dapat dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan dengan efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, dan taat pada peraturan perundangan-undangan Khalistyowati (2017).

2.2.2 Otonomi Daerah

Menurut Kodoatie (2005) pembangunan pada hakekatnya adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat,

meratakan hasil-hasil pembangunan, menambah jumlah lapangan kerja, kesempatan kerja, memperluas hubungan ekonomi regional, serta mengarahkan dan mengatur pergeseran kegiatan ekonomi dengan bijak. Pembangunan merupakan pencerminan kehendak rakyat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Otonomi yang berarti penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan kata lain pemerintah daerah mengurus urusan rumah tangganya sendiri diantaranya, perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap hasilnya.

Tujuan dari otonomi daerah adalah mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah otonom Herman (2014). Menurut Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah dipengaruhi oleh berbagai factor yang meliputi kemampuan si pelaksana, kemampuan dalam keuangan, ketersediaan alat dan bahan, dan kemampuan berorganisasi. Otonomi daerah tidak menyangkut permasalahan dalam bidang tertentu seperti politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, fiscal, dan agama serta kewenangan bidang lain, bidang tersebut termaksud kewenangan pemerintah pusat. Daerah otonom disebut juga dengan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batasan daerah tertentu dan berwenang mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri dengan aspirasi masyarakat berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan provinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten/kota, serta kewenangan pemerintah dalam bidang pemerintahan tertentu saja. Kewenangan provinsi sebagai wilayah administrasi yang mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah. Menurut Undang-Undang No 22 tahun 1999 kebupaten/kota berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi masyarakat antara kabupaten/kota dan provinsi tidak mempunyai hierarki satu sama lain, masing-masing berdiri sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kewenangan daerah mencakup dalam seluruh bidang pemerintahan. Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industry dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenanga kerja (Pasal 7 dan Pasal 11 Undang-Undang No 22 tahun 1999). Pemerintah kabupaten/kota berwenang mengelola dan bertanggung jawab hasil sumber daya nasional yang dimiliki di wiayahnya serta memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Khalistyowati (2017) Daerah otonom dapat terlaksana dengan asas desentralisasi, karena pemerintah pusat menyerahkan urusan-urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang selanjutnya merupakan tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya. Dalam hal ini memungkinkan kabupaten

menganut dan mengatur rumah tangganya sendiri dan pemerintah daerah diberi kebebasan untuk merealisasikan prakarsa pembangunan daerah dan harus bertanggung jawab sepenuhnya. Adapun teknik yang digunakan dalam menentukan bidang yang seharusnya menjadi urusan pemerintah pusat dan bidang yang seharusnya menjadi urusan pemerintah daerah, yaitu:

1. System Residu

   Telah dibentuk tugas-tugas yang menjadi kewenangan pusat, sadangkan sisanya menjadi urusan rumah tangga daerah.

2. System Meteril

   Pemerintah daerah ditetapkan satu persatu secara limitative dan terinci dan diluar tugas pemerintah daerah merupakan urusan pemerintah pusat.

3. System Formal

   Pemerintah daerah boleh mengatur dan mengurus kepentingan bagi daerahnya asal saja tidak mencakup urusan yang telah di atur oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Urusan rumah tangga daerah dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

4. System Otonomi Riil

   Tugas dan kewenangan didasari oleh factor yang nyata atau riil sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan dari daerah serta pemerintah pusat dan pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi.

5. Prinsip Otonomi yang Nyata, Dinamis dan Bertanggung Jawab

Prinsip ini variasi dari system otonomi riil, yang dapat disimpulkan sebagai: pemeberian otonomi harus didasarkan pada faktor-faktor perhitungan, tindakan, dan kebijakan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata serta mampu mengurus rumah tangganya sendiri.

Masyarakat otonom adalah masyarakat mandiri yang dapat menentukan sendiri pilihannya berdasarkan kebutuhan yang diperlukan dan dirasakan, seperti merumuskan kebijakan pembangunan daerah dan kebijakan lainnya dengan menyesuaikan kondisi dan kemampuan daerah. Syarat menjadikan daerah menjadi mandiri adalah dengan perubahan dalam tata pemerintahan di daerah sehingga fungsi pemerintah daerah sebagai fasilitator masyarakat yang optimal. Pemerintah kabupaten harus secara tegas dan jelas untuk lebih mengedepankan fungsi melayani dan memberikan fasilitas pada usaha-usaha pemberdayaan masyarakat. Pemerintah kabupaten harus konsisten dalam mengikuti perubahan paradigma pemerintahan dalam melaksanakan setiap kebijakan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Hal ini memungkinkan terwujudnya segala bidang dan mengoptimalkan seluruh komponen masyarakat daerah mau mewujudkan misi otonomisasi yaitu keadilan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Menurut Subagya (2017) pelaksanaan otonomi daerah dengan asas desentralisasi diharapkan dapat membawa implikasi luas pada masyarakat daerah ke arah yang lebih baik. Otonomi dapat mewujudkan kemandirian daerah dan munculnya prakarsa daerah dalam menghargai keanekaragaman dan potensi daerah. Sedangkan implementasi desentralisasi adalah tumbuhnya partisipasi masyarakat dengan transparansi dan

akuntabilitas kebijakan publik dan penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan secara demokratis.

2.2.3 Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah penerimaan yang didapat daera dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan undang-undang yang berlaku Elita (2002). Peranan PAD sangat penting lagi karena pemerintah daerah diharapkan dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan bertumpu pada penerimaan yang berasal dari daerahnya sendiri. Pendapatan asli daerah harus betul-betul dominan dalam pelaksanaa otonomi daerah agar tidak dibiayai dari subsidi atau dari sumbangan pihak ketiga atau pinjaman daerah. Jenis PAD terdiri dari empat, yaitu:

2.2.3.1 Pajak Daerah

Pengertian pajak menurut Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Pajak (KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi dari masyarakat dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum atau dapat digunakan untuk pembangunan.

Ditinjau dari segi Lembaga Pemungut Pajak dapat dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak negara (PPN, PBB, BPHTB, dan PPh) dan pajak daerah. Dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam pasal 1 menerangkan pajak daerah terdiri dari:

1) Pajak hotel
2) Pajak restoran dan rumah makan
3) Pajak hiburan
4) Pajak reklame
5) Pajak penerangan jalan
6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
7) Pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan

Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan pemungutan jenis pajak oleh masing-masing daerah, dengan peraturan tersebut pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam mengelola sumber-sumber penerimaan pajak di daerah. Upaya dalam peningkatan pajak dilakukan oleh perbaikan sistem perpajakan secara keseluruhan, beberapa upaya yang bisa dilakukan menurut Sitompul (1996) antara lain:

1) Menghapus pajak daerah yang tidak memuaskan
2) Memperbaiki kinerja pajak daerah yang ada
3) Meningkatkan wewenang pemerintah daerah
4) Meningkatkan administrasi pajak daerah
5) Meningkatkan pajak daerah yang baru konvensional
6) Meningkatkan pajak daerah yang baru non konvensional

Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dari pos pajak daerah menurut Elmi (2002) antara lain:

1) Upaya meningkatkan penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap jenis pajak tertentu, dengan memberi kemudahan lapangan usaha baru
2) Peranan aprasial avluation pada aset-aset daerah
3) Fungsi cara mengalokasikan penerimaan pajak untuk membiayai kegiatan yang produktif.

2.2.3.2 Retribusi Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan sebagai pembayaran dari jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah berfungsi sebagai pembayaran atas pemakaian jasa baik langsung maupun tidak langsung. Retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu:

1) Retribusi jasa umum

Retibusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah dalam kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan

2) Retribusi jasa usaha

Retribusi jasa usaha dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah dengan menganut prinsip komersial.

3) Retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 adalah kegiatan pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, dan fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkuangan.

2.2.3.3 Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Ciri-ciri pokok perusahaan daerah adalah adanya kesatuan produksi (regional) di masyarakat luas termasuk memberi jasa, menyelenggarakan pemanfaatan umum dan memupuk pendapatan Suradinata (1998). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah susunan kegiatan dan tindakan yang meliputi perencanaan penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, investarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan dan perubahan status hukum serta penata usahaannya. Barang daerah yang dipisahkan adalah barang milik daerah baik bergerak maupun tidak bergerak yang di kelola oleh perusahaan atau BUMD. Jenis dari hasil pengeloaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu:

1) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusaahan milik daerah/BUMD
2) Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN

2.2.3.4 Pos Lain-Lain Pendapatan

Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1999 menyebutkan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah adalah hasil daerah yang didapat dari usaha diluar kegiatan dan pelaksanaan tugas daerah. Dalam undang-undang menyebutkan lain-lain pendapatan yang sah, yaitu:

1) Hibah
2) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan
3) Penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah
4) Penerimaan jasa giro
5) Rupa-rupa pendapatan

2.2.4 Infrastruktur Daerah

Tujuan dari sebuah pembangunan yaitu menciptakan daerah yang dapat memaksimalkan potensi daerahnya, seperti sumber daya alam yang terkandung di dalam daerahnya atau sebuah pembangunan dapat meningkatkan pendapatan daerah sehingga masyarakat dapat diberdayakan dengan menambahkan lapangan kerja sehingga terjadilah kesejahteraan masyarakat. Memisahkan antara pembangunan antar daerah dan antar sub daerah serta masyarakat dapat terjadi kemerataan dan keadilan tanpa mencampuri urusan yang tidak terkait di dalamnya, dengan demikian dapat tercapainya *Good Governance.*

Dalam perencanaan pembangunan daerah seharusnya mencerminkan kebutuhan relitas suatu daerah, sebagaimana dinyatakan Kuncoro (2012), bahwa perencanaan pembangunan daerah tidak hanya perencanaan dari daerahnya, tetapi perencanaan untuk daerahnya. Perencanaan pembangunan berfungsi sebagai

perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumber daya publik yang ada di daerahnya.

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur mempunyai peran penting dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dan diyakini sebagai pemicu pembangunan suatu kawasan. Ketersediaan sarana perumahan dan permukiman, seperti layanan air minum dan sanitasi secara luas dan merata dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjuatan, turut menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Banyak upaya yang sudah dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah dalam menyediakan fasilitas dan layanan infrastruktur yang berkuliatas, baik dari segi pengaturan dengan kerangka regulasi maupun rehabilitasi dan penambahan kapasitas fasilitas infrastruktur yang rusak, serta pembangunan baru melalui kerangka investasi dan pelayanan umum.

Ketersediaan infrastruktur masih belum memadai yang dibuktikan dengan masih banyak kecelakaan di sektor transportasi, terjadinya krisis air dan listrik, serta lamanya pemulihan infrastruktur akibat bencana seperti gempa, banjir, dan longsor. Ketimpangan akibat terbatasnya kemampuan pembiayaan pemerintah, tingginya kebutuhan masyarakat akan infrastruktur, dan adanya potensi bergabungnya investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur mendorong pemerintah untuk reformasi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.

Banyaknya program pembangunan pada berbagai bidang telah dilakukan, tetapi masih banyak daerah yang tertinggal dalam berbagai aspek. Salah satu

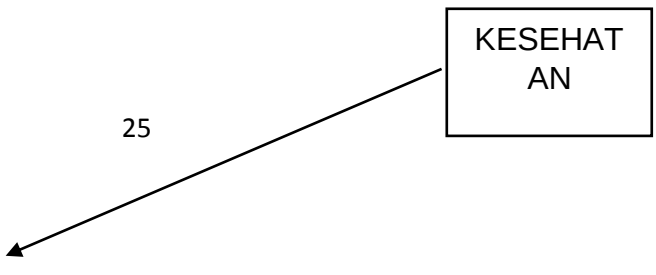
ketertinggalan tersebut adalah minimnya akses warga desa terhadap sarana penunjang kehidupan. Kondisi ini menyebabkan umumnya pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal sangat rendah bahkan stagnasi. Peningkatan daerah yang dilakukan pada Kabupaten Tasikmalaya untuk membuat daerah dapat bersaing dengan daerah lain sehingga menjadikan daerah yang memiliki perkembangan yang sangat baik, hal ini dapat berjalan dengan cara perbaikan dalam sektor infrastruktur daerah agar jauh dari yang dikatakan daerah tertinggal.

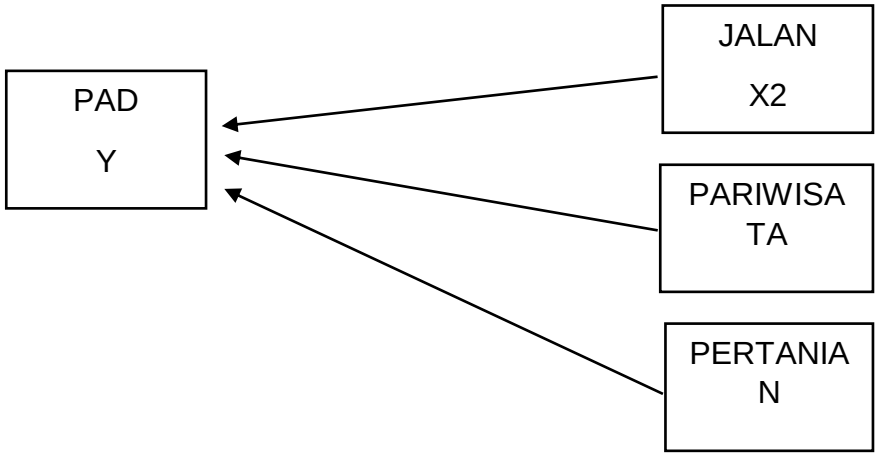
2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini penulis meneliti pengaruh dari variabel terikat *(dependen variabel)* Pendapatan Asli Daerah, terhadap variabel bebas *(independent variabel)* Pembangunan Infrastruktur Daerah yang mengambil studi di Kabupaten Tasikmalaya. Penelitian ini menggunakan model *Error Correction Model* (ECM) yang menerangkan bagaimana salah satu dari sumber penerimaan pendapatan daerah yang dijadikan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang diambil pada penelitian ini yaitu Sektor Kesehatan, Sektor Jalan, Sektor Pariwisata, dan Sektor Pertanian memiliki pengaruh dalam jangka panjang dan jangka pendek dengan Pendapatan Asli Daerah. Kerangka berfikir ini dapat dituangkan dalam sebuah model penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran





2.4 Hipotesis

Menurut Sukirno (2004) hipotesis adalah suatu pernyataan mengenai bagaimana variabel-variabel yang dibicarakan berkaitan satu sama lain. Berdasarkan landasan teori di atas maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

1) Dalam jangka panjang dan jangka pendek pada pembangunan infrastruktur kesehatan berpengaruh positif terhadap PAD
2) Dalam jangka panjang dan jangka pendek pada pembangunan infrastruktur jalan berpengaruh positif terhadap PAD
3) Dalam jangka panjang dan jangka pendek pada pembangunan infrastruktur pariwisata berpengaruh positif terhadap PAD
4) Dalam jangka panjang dan jangka pendek pada pembangunan infrastruktur pertanian berpengaruh positif terhadap PAD

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Cara Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan adalah *times series*, berkaitan selama enam tahun yaitu dari tahun 2011 sampai 2016 dengan menggunakan data Triwulan per setiap tahunnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang telah diolah oleh pihak lain dan disajikan dalam bentuk tabel. Data diambil dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) di JL. Sukapura 2 Bojong Koneng Singaparna Tasikmalaya dan sebagian data dari website yang terpecaya yaitu Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK). Penulis juga menggunakan data primer dengan melakukan observasi secara langsung dan melakukan sedikit wawancara dengan bagian yang berkepentingan, yaitu Bapak Roni sebagai pegawai di BAPPEDA. Dari wawancara yang dilakukan diharapkan

peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subyek yang diteliti, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam subyek penelitian.

3.2 Definisi Operasinal Variabel

Didalam penelitian ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tasikmalaya sebagai variabel dependen, sedangkan sektor kesehatan, sektor jalan, sektor pariwisata dan sektor pertanian sebagai variabel independen.

3.2.1 Variabel Dependen

Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan daerah yang ada di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2011-2016 dengan menggunakan data Triwulan disetiap tahunnya (dalam Rupiah).

3.2.2 Variabel Independen

Infrastruktur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk kegiatan pembangunan infrastruktur. Dalam penelitian ini diambil empat sektor infrastruktur, yaitu:

a) Sektor kesehatan, yaitu dana yang digunakan bertujuan untuk memperbaiki system serta membangun fasilitas kesehatan demi terbentuknya kenyamanan dalam pelayanan bagi masyarakat (dalam Rupiah), seperti: pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas, rumah sakit jiwa, dan posyandu.

b) Sektor pertanian, yaitu dana yang digunakan bertujuan untuk menambah nilai jual hasil pertanian dan memperbaiki ataupun membangun fasilitas dalam menunjang pertanian (dalam Rupiah), seperti: membangun sarana pengembangan agribisnis, mencetak lahan sawah baru, dan terfasilitasinya teknologi pertanian/perkebunan.
c) Sektor pariwisata, yaitu dana yang digunakan bertujuan untuk memperbaiki dan membangun fasilitas pariwisata (dalam Rupiah), seperti: pengelolaan kekayaan budaya dan pengembangan destinasi pariwisata.
d) Sektor jalan, yaitu dana yang digunakan bertujuan untuk memperbaiki serta membangunan fasilitas jalan (dalam Rupiah), seperti: pembangunan jalan, pemeliharaan jalan, pengadaan alat berat untuk pembangunan jalan.

3.3 Metode Analisis Data

Dalam sebuah analisis data diperlukan sebuah metode atau pengujian yang dapat membuktikan hasil dari penelitian dikatakan akurat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengujian analisis sebagai berikut:

3.3.1 Uji Stasioneritas

Menurut Ariefianto (2012) Pengujian stasioneritas data adalah hal terpenting dalam menganalisis data dengan urut waktu. Pengujian yang tidak memadai dapat mengakibatkan pemodelan menjadi tidak baik sehingga hasil yang diberikan dapat bersifat *spurious* (palsu). Terdapat berbagai metode dalam uji stasioneritas. Metode yang sering digunakan yaitu unit root test atau sering dikatakan uji akar unit. Dalam uji akar unit penulis menggunakan uji *Phillip dan Perron* (PP). Uji

Phillip dan Peron merupakan alternatif dari uji *Augmented Dickey-Fuller* (ADF), dimana dalam menggunakan *lag term* untuk menghilangkan autokorelasi yang ada pada *data generating process* (DGP) maka suatu teknik nonparametris dalam mengoreksi nilai t hitung. Nilai *lag term* dinilai akan mengurangi derajat kebebasan. Dengan ini uji *Philip-Perron* mengklaim power yang lebih baik dari uji ADF Ariefianto (2012).

3.3.2 Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi diketahui untuk adanya hubungan jangka panjang antar variable-variabel yang akan diteliti. Data dapat dikatakan memiliki hubungan jangka panjang apabila data tersebut terkointegrasi pada tingkat level yang sama. Diasumsikan bila data menunjukan kointegrasi, maka variabel dalam penelitian memiliki hubungan jangka panjang dan sebaliknya bila data tersebut tidak menunjukan kointegrasi, maka tidak ada hubungan jangka panjang pada variabel penelitian. Ada tidaknya kointegrasi didasarkan pada *likelihood ratio* (LR). Jika nilai kritis LR lebih kecil dibandingkan dengan nilai hitung LR maka terdapat kointegrasi. Johansen memberikan inovasi dengan menciptakan uji stasistik LR sebagai alternatif yang dikenal dengan *maximum eigenvalue statistic*. Apabila nilai trace statistic lebih besar dibandingkan nilai kritis (pada α = 1%, 5%, 10%) maka terdapat kointegrasi, begitu juga sebaliknya jika trace statistic lebih kecil

dibandingkan nilai kritis maka tidak terdapat kointegrasi antar variabel dalam penelitian Widarjono (2013).

3.3.3 *Error Correction Model (ECM)*

Di dalam sebuah data *time series* sering sekali ditemukan data yang tidak stasioner, hal ini dapat menyebabkan hasil regresi yang menjadi meragukan atau regresi lancung. Regresi lancung merupakan situasi dimana hasil regresi dapat menunjukan nilai koefisien regresi yang signifikan secara model, signifikan secara model tidak ada saling keterkaitan antar variabel. ECM yaitu salah satu model yang tepat dalam time series yang tidak stasioner. Data yang tidak stasioner sering menimbulkan ketidakseimbangan dalam analisis jangka pendek, akan tetapi bias menjadi adanya hubungan yang seimbang dalam analisis jangka panjang Widarjono (2013). Berikut ini adanya model estimasi PAD jangka panjang dalam bentuk persamaan yang digunakan dalam penelitian ini:

$$\text{PAD} = \boldsymbol{\alpha_0} + \boldsymbol{\alpha_1}\text{KES} + \alpha_2\text{PER} + \alpha_3\text{PAR} + \alpha_4\text{JAL} + \boldsymbol{u_{t\ldots}}$$

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

KES = Pembangunan Infrastruktur Kesehatan

PER = Pembangunan Infrastrukutr Pertanian

PAR = Pembangunan Infrastruktur Pariwisata

JAL = Pembangunan Infrastruktur Jalan

Sedangkan estimasi jangka pendek PAD dengan menggunakan persamaan ECM dalam penelitian sebagai berikut:

$$\Delta PAD = \beta_0 + \beta_1 \Delta KES + \beta_2 \Delta PER + \beta_3 \Delta JAL + \beta_4 \Delta PAR + \beta_5 ECT + u_t$$

Keterangan:

ΔKES = Perubahan Pembangunan Infrastruktur Kesehatan

ΔPER = Perubahan Pembangunan Infrastruktur Pertanian

ΔPAR = Perubahan Pembangunan Infrastruktur Pariwisata

ΔJAL = Perubahan Pembangunan Infrastruktur Jalan

β = Koefisien Regresi Jangka Pendek

ECT = *Error Correction Terms*

Δ (Delta) = Diffrenc

3.3.4 *Error Correction Terms (ECT)*

ECT adalah bagian elemen dalam pengujian analisa yang secara dinamis dari metode ECM. Nilai ECT didapat dari penjumlahan antara variabel dependen bulan sebelumnya dikurangi variabel independen bulan sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh hubungan antar variabel baik dalam jangka panjang dan jangka pendek. Kriteria ECT, apabila nilai ECT harus positif dan signifikan maka model ECT dapat dikatakan valid dan dapat dijabarkan variabel independennya.

3.3.5 Uji Asumsi Klasik

Dalam menunjukan hubungan data yang valid, maka diperlukan pengujian asumsi klasik pada model regresi. Untuk mencapai tahap valid ada beberapa tahapan yang harus dipenuhi, yaitu:

a. Uji Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai terjadinya korelasi antara data pengamatan sebelumnya, dengan kata lain bahwa munculnya suatu data dipengaruhi oleh data sebelumnya. Dalam mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan uji *Breusch-Godfrey* atau lebih familiar dengan sebutan uji *lagrange-multiplier(LM)*. Metode ini cocok digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya autokorelasi tergantung pada tingkat kelambanan yang dipilih Widarjono (2013).

1) H0 : Jika X^2 hitung > X^2 kritis pada derajat kepercayaan tertentu (α), bisa diartikan model tersebut memiliki masalah autokorelasi.
2) H1 : Jika X^2 hitung < X^2 kritis pada derajat kepercayaan tertentu (α), bisa diartikan model tersebut tidak memiliki masalah autokorelasi.

b. Uji Heterokedastisitas

Heterokedastisitas adalah untuk mendeteksi apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedositas atau tidak terjadi heterokedastisitas Ghozali (2001). Terdapat banyak test yang dikembangkan untuk menguji keberadaan heterokedastisitas,

namun 2 metode yang paling popular, yakni *Breusch-Pagan Test* dan *White Test.* Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *Breusch-Pagan Test.*

c. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas terjadi ketika antar variabel bebas memiliki interdependesi yang signifikan. Hal ini dapat menghasilkan suatu koefisien estimasi yang tidak stabil secara numeric. Uji ini dilakukan dengan beberapa cara yaitu, jika f-statistik mempunyai tingkat signifikan yang tinggi namun t-statistik tidak ada yang signifikan. Kedua, jika R^2 relatif besar tetapi t-statistik tidak ada yang signifikan. *Multicolinearity* secara umum dapat ditentukan dengan melihat matriks korelasi dari variabel bebas. Jika terjadi koefisien korelasi lebih dari 0,8 atau 0,9 antar variabel bebas maka terdapat masalah serius dengan *Multicolinearity.*

d. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada sebuah model regresi antara variabel independen dan variabel dependen terdapat distribusi normal atau tidak. Dalam model regresi seharusnya antara variabel independen dan dependen datanya berdistribusi normal atau mendekati dalam artian normal. Keputusan yang diambil pada model regresi uji normalitas, yaitu:

1) H0 : Jika chi-square > dari nilai derajat kepercayaan tertentu (α), bisa diartikan model tersebut berdistribusi normal.
2) H1 : Jika chi-square < dari nilai derajat kepercayaan tertentu (α), bisa diartikan model tersebut tidak berdistribusi normal.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Diskripsi Data Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang di dapat dari BAPPEDA, DPPKAD, dan sebagian data diambil di website DJPK. Jenis data yang digunakan adalah *time series* yang terbentuk dari tahun 2011 sampai tahun 2016 dengan menggunakan data Triwulan di setiap tahunnya. Data tersebut adalah data sektor kesehatan, sektor jalan, sektor pariwisata, sektor pertanian, dan Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui

seberapa besar pengaruh dalam jangka panjang dan jangka pendek dari sektor kesehatan, sektor jalan, sektor pariwisata, sektor pertanian terhadap Pendapatan Asli Daerah. Model yang ditentukan dalam penelitian ini adalah model *Error Correction Models (ECM)*.

4.2 Analisis Model ECM

Dalam model ECM dapat melihat jangka panjang dan jangka pendek yang akan mempengaruhi variabel independen terhadap variabel dependen. Ada beberapa model tahapan uji yang dperlukan, diantaranya sebagai berikut:

4.2.1 Uji Stasioneritas

Uji stasioneritas adalah tahap pertama dalam pengujian model ECM yaitu menguji akar-akar unit untuk mengetahui derajat integrasi. Pengujian data yang digunakan adalah uji *akar unit root test* yang dikembangkan oleh *Phillips Perron*. Untuk menguji uji *akar unit root test* syaratnya, yaitu: jika nilai t-statistik > pada nilai yang tertera di critical value maka dapat dikatakan menolak H0 adanya akat unit, sehingga data yang telah di uji dan diamati dianggap stasioner. Begitu juga sebaliknya jika t-statistik < pada nilai yang tertera di critical value maka dapat dikatakan menerima H0 yang dianggap data tidak stasioner, lalu jika terjadi data yang tidak stasioner maka data tersebut bisa dilakukan uji akar unit (*unit root test*).

Tabel 4.1

Hasil Pengujian Akar Unit

ADF Statistik	Adj T-statistik Level Data	Adj T-statistik First-difference	Critical Value (α=5%) Level Data	Critical Value (α=5%) First Difference
PAD	-1.060316	-13.04050	-2.998064	-3.004861
KESEHATAN	-1.797312	-5.345951	-2.998064	-3.004861
PERTANIAN	-2.702713	-11.02985	-2.998064	-3.004861
PARIWISATA	-5.877733	-15.75883	-2.998064	-3.004861
JALAN	-3.970372	-11.52297	-2.998064	-3.004861

Sumber : Hasil Olahan Eviews

Berdasarkan hasil yang telah diolah di eviews pada pengujian akar unit root test pada variabel PAD, kesehatan, dan pertanian yang tidak stasioner pada tingkat level sedangkan variabel lainnya menunjukan stasioner pada tingkat level. Setelah pengujian kembali dengan akar unit root test pada tingkat first difference variabel PAD, kesehatan, dan pertanian signifikan atau stasioner pada tingkat first difference. Dengan ini maka data tersebut bisa dilanjutkan kembali pada uji kointegrasi.

4.2.2 Uji Kointegrasi

Pada tahap uji kointegrasi ini, dapat mengetahui adanya hubungan jangka panjang antar variabel. Jika terdapat kointegrasi maka data tersebut memiliki analisis jangka panjang antar variabel, jika tidak terdapat kointegrasi maka dapat dikatakan tidak memiliki jangka panjang dan tidak perlu dicari jangka panjangnya. Melihat adanya kointegrasi antar variabel dapat dilihat dengan cara membandingkan nilai kritis dengan nilai trace statistiknya. Jika nilai kritis (α=1%, 5%, 10%) < nilai trace statistiknya maka dapat diambil kesimpulan bahwa

terdapat kointegrasi antar variabel. Jika nilai kritis > nilai trace statistiknya maka tidak terdapat kointegrasi. Berikut hasil kointegrasi yang telah diolah pada penelitian:

Tabel 4.2

Hasil Uji Kointegrasi PAD

Date: 04/10/18 Time: 23:42
Sample (adjusted): 2011Q3 2016Q4
Included observations: 22 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: PAD KESEHATAN JALAN PARIWISATA PERTANIAN
Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.800573	92.54224	69.81889	0.0003
At most 1 *	0.623646	57.07146	47.85613	0.0054
At most 2 *	0.583553	35.57251	29.79707	0.0097
At most 3 *	0.410842	16.30059	15.49471	0.0377
At most 4 *	0.190935	4.661266	3.841466	0.0308

Trace test indicates 5 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Sumber : Hasil Olahan Eviews

Berdasarkan hasil olahan eviews diatas menunjukan adanya kointegrasi pada nilai critical value 5%, yang artinya jika terdapat kointegrasi, maka data tersebut bisa dianalisis jangka panjangnya. Model selanjutnya adalah pengujian regresi jangka panjang dan regresi jangka pendek.

4.2.3 Analisis Regresi Jangka Panjang PAD

Tabel 4.3

Hasil Regresi Jangka Panjang PAD

Dependent Variable: PAD
Method: Least Squares
Date: 04/10/18 Time: 23:32
Sample: 2011Q1 2016Q4
Included observations: 24

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.33E+10	1.54E+10	2.814693	0.0111
KESEHATAN	-0.560498	0.709718	-0.789748	0.4394
JALAN	0.996546	0.563434	1.768701	0.0930
PARIWISATA	-20.32661	8.849053	-2.297038	0.0332
PERTANIAN	3.701193	1.588198	2.330435	0.0310

R-squared	0.631507	Mean dependent var	9.09E+10
Adjusted R-squared	0.553930	S.D. dependent var	6.55E+10
S.E. of regression	4.38E+10	Akaike info criterion	52.02502
Sum squared resid	3.64E+22	Schwarz criterion	52.27045
Log likelihood	-619.3002	Hannan-Quinn criter.	52.09013
F-statistic	8.140340	Durbin-Watson stat	0.871930
Prob(F-statistic)	0.000532		

Sumber : Hasil Olahan Eviews

Berdasarkan hasil regresi yang telah dilakukan, diketahui bahwa nilai prob (F-statistik) atau uji F sebesar 0.000532. Dapat disimpulkan bahwa nilai F statistic berada dibawah nilai alpha=5% dan secara statistic dapat dikatakan signifikan. Hal ini menunjukan bahwa variabel kesehatan, jalan, pariwisata, dan pertanian bersama-sama berpengaruh terhadap PAD dalam jangka panjang.

Sedangkan uji T pada variabel kesehatan diperoleh T statistic sebesar -0.789748 dengan mencari T kritis dengan alpha =5% dan df =19 diperoleh sebesar 1.72913 (dilihat dari nilai T tabel). Sehingga T statistic < T kritis yang berarti dalam jangka panjang sektor kesehatan tidak signifikan dan berpengaruh negatif terhadap PAD.

Pada uji T pada variabel jalan diperoleh T statistic sebesar 1.768701 dengan mencari T kritis dengan alpha =5% dan df =19 diperoleh sebesar 1.72913

(dilihat dari nilai T tabel). Sehingga T statistic > T kritis yang berarti dalam jangka panjang sektor jalan signifikan dan berpengaruh positif terhadap PAD.

Pada uji T pada variabel pariwisata diperoleh T statistic sebesar -2.297038 dengan mencari T kritis dengan alpha =5% dan df =19 diperoleh sebesar 1.72913 (dilihat dari nilai T tabel). Sehingga T statistic > T kritis yang berarti dalam jangka panjang sektor pariwisata signifikan dan berpengaruh negatif terhadap PAD.

Pada uji T pada variabel pertanian diperoleh T statistic sebesar 2.330435 dengan mencari T kritis dengan alpha=5% dan df=19 diperoleh sebesar 1.72913 (dilihat dari nilai T tabel). Sehingga T statistic > T kritis yang berarti dalam jangka panjang sektor pertanian signifikan dan berpengaruh positif terhadap PAD.

Hasil regresi jangka panjang PAD dapat diperoleh dari nilai (R square) dikali 100%. Nilai R square 0.631507 dikali 100% yang hasilnya 63.15% (dijelaskan oleh variabel kesehatan, jalan, pariwisata, dan pertanian) sedangkan sisanya sebesar 36.85% dijelaskan oleh variabel lain.

Setelah dilakukannya regresi jangka panjang tahap selanjutnya adalah melakukan analisis regresi jangka pendek, berikut adalah hasil regresi jangka pendek:

4.2.4 Analisi Regresi Jangka Pendek PAD

Tabel 4.4

Hasil Regresi Jangka Pendek PAD

Dependent Variable: PAD
Method: Least Squares
Date: 04/10/18 Time: 23:43
Sample (adjusted): 2011Q3 2016Q4
Included observations: 22 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	5.03E+10	1.68E+10	2.985296	0.0087
KESEHATAN	-0.481861	0.689796	-0.698557	0.4949
JALAN	0.752439	0.575303	1.307900	0.2094
PARIWISATA	-16.25683	8.844890	-1.837992	0.0847
PERTANIAN	3.384157	1.554908	2.176436	0.0448
ECT(-1)	0.530787	0.295246	1.797778	0.0911

R-squared	0.670956	Mean dependent var	9.74E+10
Adjusted R-squared	0.568129	S.D. dependent var	6.44E+10
S.E. of regression	4.23E+10	Akaike info criterion	52.00216
Sum squared resid	2.87E+22	Schwarz criterion	52.29971
Log likelihood	-566.0237	Hannan-Quinn criter.	52.07225
F-statistic	6.525130	Durbin-Watson stat	1.652003
Prob(F-statistic)	0.001730		

Sumber : Hasil Olahan Eviews

Berdasarkan hasil regresi diatas, nilai koefisien ECT (PAD) sebesar 0.530787, apabila dilihat dari taraf signifikansi hasil regresi ECT dari nilai prob ECT sebesar 0.0911 yang artinya bahwa variabel ini bisa dibilang signifikan atau dibawah dari taraf signifikansi α=10%. Dapat disimpulkan, bahwa model ECM tersebut adalah cocok dan tepat dalam penelitian ini. Oleh karenanya pengujian ECM dikatakan valid.

Nilai prob (F-statistik) atau sering dikenal dengan uji F sebesar 0.001730 bisa diartikan bahwa nilai F-statistik berada dibawah nilai α = 5%, dan secara statistic dapat dikatakan signifikan. Hal ini menunjukan bahwa variabel kesehatan, jalan, pariwisata, dan pertanian bersama-sama berpengaruh terhadap PAD dalam jangka pendek.

Sedangkan uji T pada variabel kesehatan diperoleh T statistic sebesar -0.698557 dengan mencari T kritis dengan alpha =5% dan df = 17 diperoleh

sebesar 1.73961 (dilihat dari nilai T tabel). Sehingga T statistic < T kritis yang berarti dalam jangka pendek sektor kesehatan tidak signifikan dan berpengaruh negatif terhadap PAD.

Pada uji T pada variabel jalan diperoleh T statistic sebesar 1.307900 dengan mencari T kritis dengan alpha =5% dan df = 17 diperoleh sebesar 1.73961 (dilihat dari nilai T tabel). Sehingga T statistic < T kritis yang berarti dalam jangka pendek sektor jalan tidak signifikan dan berpengaruh positif terhadap PAD.

Pada uji T pada variabel pariwisata diperoleh T statistic sebesar -1.837992 dengan mencari T kritis dengan alpha =5% dan df = 17 diperoleh sebesar 1.73961 (dilihat dari nilai T tabel). Sehingga T statistic > T kritis yang berarti dalam jangka pendek sektor pariwisata signifikan dan berpengaruh negatif terhadap PAD.

Pada uji T pada variabel pertanian diperoleh T statistic sebesar 2.176436 dengan mencari T kritis dengan alpha=5% dan df = 17 diperoleh sebesar 1.73961 (dilihat dari nilai T tabel). Sehingga T statistic > T kritis yang berarti dalam jangka pendek sektor pertanian signifikan dan berpengaruh positif terhadap PAD.

Hasil estimasi regresi jangka pendek PAD diperoleh dari nilai R^2 sebesar 0.670956 dikali 100% yang hasilnya 67.09% (dapat dijelaskan pada variabel kesehatan, jalan, pariwisata, dan pertanian) sedangkan sisanya sebesar 32.91 % dijelaskan oleh variabel lain.

4.2.5 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Autokorelasi

Tabel 4.5

Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	6.184189	Prob. F(2,17)	0.0096
Obs*R-squared	10.10751	Prob. Chi-Square(2)	0.0064

Sumber: Hasil Olahan Eviews

Nilai Prob Chi-square sebesar 0,0064 < 0,05 berarti terdapat autokorelasi, dengan hasil ini maka dibutuhkan metode diferensi agar hasil menunjukan tidak terdapat autokorelasi. Dengan perbaikan menggunakan metode diferensi mendapatkan hasil:

Tabel 4.6

Hasil Diferensi Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.351031	Prob. F(2,16)	0.1273
Obs*R-squared	5.223993	Prob. Chi-Square(2)	0.0734

Sumber: Hasil Olahan Eviews

Berdasarkan hasil autokorelasi yang sudah disembuhkan dengan diferensi autokorelasi maka nilai Prob Chi-Square sebesar 0,0734 > 0,05 berarti tidak terdapat autokorelasi.

b. Uji Heterokedastisitas

Tabel 4.7

Hasil Uji Heterokedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.641568	Prob. F(4,19)	0.6394
Obs*R-squared	2.855872	Prob. Chi-Square(4)	0.5822
Scaled explained SS	1.547002	Prob. Chi-Square(4)	0.8183

Sumber : Hasil Olahan Eviews

Berdasarkan data yang telah diteliti dengan menggunakan *Breusch-Pagan-Godfrey Test* dapat disimpulkan bahwa hasil regresi menunjukan tidak terdapat masalah heterokedastisitas, dikarenakan Prob Chi-Square sebesar 0,5822 > α=5%.

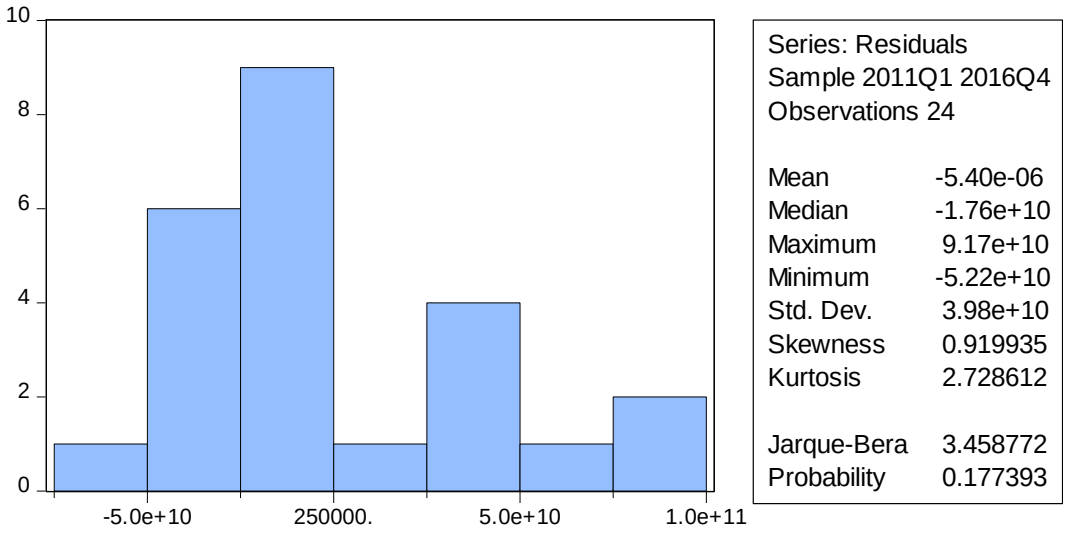
c. Uji Multikolinearitas

Untuk melihat adanya keberadaan multikolinearitas, salah satunya adalah dengan cara melihat R-squarednya. Apabila nilai R-squarednya tinggi tetapi sedikit rasio t yang signifikan maka diduga terdapat gejala multikolinearitas (Hapsari, 2003). Asumsi keberadaan multikolinearitas boleh diabaikan apabila pada regresi awal, paling sedikit ada satu variabel independen yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen yang berpengaruh signifikan, yaitu Pembangunan Jalan, Pembangunan Pariwisata, dan Pembangunan Pertanian. Sehingga keberadaan multikolinearitas boleh diabaikan.

d. Uji Normalitas

Grafik 4.8

Hasil Uji Normalitas



Sumber: Hasil olahan eviews

Grafik diatas menunjukan bahwa nilai Prob dari uji normalitas PAD sebesar 0.177393 > α=5% menunjukan bahwa hasil regresi tersebut tidak ada masalah atau dapat dikatakan berdistribusi normal.

4.3 Interpretasi Analisis Ekonomi

Setelah dilakukannya pengujian antara variabel Pembangunan Infrastruktur Daerah dengan variabel PAD, maka dapat dijelaskan bahwa dalam jangka panjang terdapat hubungan negatif dan tidak signifikan pada infrastruktur kesehatan terhadap PAD. Hal ini dikarenakan efek pada pembangunan infrastruktur kesehatan belum dirasakan oleh masyarakat, sebab minimnya rumah sakit, puskesmas, posyandu, dan alat penunjang kesehatan khususnya di daerah pedesaan. Hal ini berdampak pada sebagian masyarakat kurang mendapat layanan kesehatan dari pemerintah, yang menyebabkan masyarakat tidak optimal dalam bekerja dalam mendapatkan pendapatan.

Sedangkan dalam jangka pendek terdapat hubungan negatif dan tidak signifikan pada pembangunan infrastruktur kesehatan terhadap PAD. Hal ini dkarenakan pada jangka pendek tidak meratanya masyarakat yang mendapat bantuan dan layanan kesehatan dari pemerintah, serta terbatasnya pengadaan alat kesehatan khususnya di daerah pedesaan. Menyebabkan produktivitas masyarakat dalam bekerja berkurang yang mempengaruhi pendapatan yang didapat masyarakat menjadi tidak optimal.

Kesehatan masyarakat merupakan modal dalam bekerja, sehingga apabila kesehatan masyarakat menurun maka tingkat produktivitas dan pendapatan yang diterima oleh masyarakat akan menurun dan akan mempengaruhi penurunan penerimaan PAD.

Dalam jangka panjang pada pembangunan infrastruktur jalan memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap PAD. Apabila pembangunan infrastruktur jalan naik 1 Rupiah maka akan menaikan penerimaan PAD sebesar 0,996546 Rupiah. Hal ini dikarenakan pada jangka panjang penggunaan pembangunan jalan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti akses jalan di Kabupaten Tasikmalaya sering dilewati oleh masyarakat Jakarta, Bandung, dan lainnya yang akan ke Jawa Tengah maupun sebaliknya, sehingga berdampak pada perputaran perekonomian di Kabupaten Tasikmalaya menjadi lebih baik.

Sedangkan dalam jangka pendek terdapat hubungan yang positif dan tidak signifikan pada pembangunan infrastruktur jalan terhadap PAD. Hal ini

dikarenakan penggunaan pada pembangunan jalan pada jangka pendek belum dirasakan oleh masyarakat, sebab tidak semua masyarakat dapat menikmati pembangunan jalan. Pembangunan jalan khususnya di daerah pedesaan belum dirasakan oleh masyarakat sebab masih minimnya jalan maupun kurangnya akses jalan dari desa ke kota maupun sebaliknya yang mengakibatkan terhambatnya perekonomian daerah.

Pembangunan jalan menjadi salah satu hal penting demi meningkatnya perekonomian daerah dan demi kenyamanan aktivitas masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Ketika pembangunan jalan itu terhambat, maka otomomatis kegiatan perekonomian di daerah akan ikut terhambat dan akan mempengaruhi penurunan penerimaan PAD.

Pada pembangunan infrastruktur pariwisata pada jangka panjang memiliki hubungan yang negative dan signifikan terhadap PAD. Apabila pembangunan infrastruktur pariwisata turun 1 Rupiah maka akan menaikan penerimaan PAD sebesar 20,32661 Rupiah. Hal ini dikarenakan kurangnya sarana dan prasana pendudukung pariwisata seperti akses jalan menuju tempat wisata, dan fasilitas untuk tempat wisata pada jangka panjang akan tetap menaikan penerimaan PAD. Hal ini disebabkan oleh pada setiap tahunnya dari 2011-2016 pemerintah lebih meningkatkan program pengembangan pemasaran pariwisata yang sudah terkenal dikalangan masyarakat, seperti mempromosikan tempat wisata gunung galunggung, situ gede, dan tempat wisata lainnya. Di Kabupaten Tasikmalaya juga banyak menggelar acara seperti festival kebudayaan agar menarik minat wisatawan, sehingga menjadikan pemerintah tetap mendapat penerimaan PAD.

Sedangkan dalam jangka pendek terdapat hubungan yang negative dan signifikan terhadap PAD. Apabila pembangunan infrastruktur pariwisata turun 1 Rupiah maka akan menaikan penerimaan PAD sebesar 16,25683 Rupiah. Hal ini dikarenakan banyaknya tempat wisata yang berpontensi dalam meningkatkan kunjungan wisatawan, tetapi kurangnya pengelolaan dari pemerintah seperti curug badak dan curug blak yang dikelola baik oleh masyarakat disekitar. Kurangnya gerakan yang bersinergi antara pemerintah dan masyarakat menjadikan potensi wisata menjadi tertinggal atau kurang diperhatikan oleh pemerintah, tetapi dapat menghasilkan retribusi dan pajak kepada pemerintah dari hasil wisata yang dikelola oleh masyarakat.

Potensi pariwisata yang berada di Kabupaten Tasikmalaya sangat banyak. Tasikmalaya memiliki gunung, pantai, laut, danau, dan sungai untuk arungjeram bahkan wisata religi serta wisata budaya. Namun, berkembang dan majunya sektor pariwisata tergantung kepada manajemennya. Ketika pemerintah dan masyarakat bersinergi dan mempunyai konsep yang jelas dalam mengelola pariwisata, maka akan menimbulkan pendapatan yang maksimal untuk pemerintah maupun masyarakat.

Pada pembangunan infrastruktur pertanian dalam jangka panjang memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap PAD. Apabila pembangunan infrastruktur pertanian naik 1 Rupiah maka akan menaikan penerimaan PAD sebesar 3,701193 Rupiah. Hal ini dikarenakan upaya pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dengan membuka lahan baru untuk mendukung ketersediaan dan ketahanan bahan pangan. Meningkatkan kemampuan SDM

dalam bidang pertanian dengan membangun dan mengembangkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pertanian di beberapa kecamatan, sehingga usaha yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur pertanian, akan menjadikan pemenuhan kebutuhan bahan pangan dari tahun ke tahun menjadi surplus.

Sedangkan dalam jangka pendek terdapat hubungan yang positif dan signifikan terhadap PAD. Apabila pembangunan infrastruktur pertanian naik 1 Rupiah maka akan menaikan penerimaan PAD sebesar 0,530787 Rupiah. Hal ini dikarenakan sektor pertanian sebagai sektor penyedia lapangan kerja di Kabupaten Tasikmalaya. Sektor pertanian merupakan penyedia utama kebutuhan pangan masyarakat yang merupakan kebutuhan dasar dan hak asasi manusia. Sektor pertanian juga menyediakan pasar yang sangat besar untuk produk manufaktur karena jumlah penduduk perdesaan yang besar dan terus mengalami peningkatan.

Dengan demikian, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan di wilayah perdesaan melalui peningkatan pendapatan mereka yang bekerja di sektor pertanian. Ketika sektor pertanian meningkat maka akan mempengaruhi penerimaan PAD yang diambil dari pajak yang bekerja di sektor pertanian.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Diadakannya pembangunan infrastruktur diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk lebih memaksimalkan pendapatan daerahnya, sehingga daerah Kabupaten Tasikmalaya dapat semakin memajukan dan mengembangkan daerahnya. Dengan ini dapat diambil kesimpulan, yaitu:

1. Dalam jangka panjang dan jangka pendek pada pembangunan infrastruktur kesehatan tidak berkontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Hal dikarenakan kurangnya fasilitas penunjang kesehatan di rumah sakit, puskesmas dan posyandu serta masih minimnya puskesmas dan posyandu yang berada di desa. Dalam penelitian ini, Program yang di jalankan oleh pemerintah pada sektor kesehatan, hanya sebagian masyarakat yang merasakan manfaat pada pembangunan infrastruktur kesehatan. Hal ini menunjukan kesehatan yang didapat oleh masyarakat tidak berkontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah.
2. Dalam jangka panjang pada pembangunan infrastruktur jalan berkontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan pada jangka panjang manfaaat pada pembangunan jalan lebih dirasakan oleh masyarakat, ketika penggunaan jalan lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, maka perputaran perekonomian di Kabupaten Tasikmalaya menjadi lebih baik. Sedangkan pada jangka pendek penggunaan jalan tidak berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan terbatasnya akses jalan dari desa ke kota maupun sebaliknya, sehingga masyarakat terhambat dalam kegiatan ekonomi dari desa ke kota maupun sebaliknya.

3. Dalam jangka panjang dan jangka pendek pada pembangunan infrastruktur pariwisata dapat berkontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Meskipun kurangnya sarana dan prasarana pendukung pariwisata serta kurangnya pengelolaan antara pemerintah dan masyarakat di beberapa tempat wisata akan menaikan pendapatan asli daerah. Kenaikan pendapatan asli daerah, disebabkan dari baiknya pembagian pengeloaan antara pemerintah dan masyarakat. Ketika tempat wisata yang kurang terkenal dan kurang terkelola baik oleh pemerintah, tetapi dapat terkelola cukup baik oleh masyarakat sekitar. Program pemerintah pada jangka panjang lebih memfokuskan pada pemasaran, agar menarik minat wisatawan ke Kabupaten Tasikmalaya, sehingga sektor pariwisata dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah.
4. Dalam jangka panjang dan jangka pendek pada pembangunan infrastruktur pertanian dapat berkontribusi terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Hal ini dikarenakan program yang dilaksanakan oleh pemerintah difokuskan pada peningkatan produksi hasil pertanian dan pengembangan pertanian ramah lingkungan. Peningkatan kualitas SDM dengan mengembangkan SMK Pertanian serta mempeluas lahan sawah, hal ini menjadikan kemampuan sdm menjadi lebih baik dan produksi bahan pangan menjadi banyak.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, penulis mengajukan saran-saran dengan harapan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak serta alternatif dalam

mengatasi masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Sektor kesehatan

Pihak pemerintah hendaknya meningkatkan pembangunan puskesmas dan alat-alat penunjang kesehatan khususnya di daerah pedesaan agar semua SDM dapat merasakan kesehatan secara merata.

2. Sektor jalan

Perbaikan dan pembangunan jalan desa ke kota harus lebih diperhatikan oleh pemerintah sebab ketika adanya jalan yang efektif digunakan oleh masyarakat akan berdampak pada perputaran perekonomian di desa menjadi lebih baik.

3. Sektor pariwisata

Pemerintah hendaknya lebih meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pariwisata, seperti memperbaiki akses jalan menuju tempat wisata dan membuat penginapan seperti villa agar wisatawan menjadi lebih nyaman dalam berekreasi ke Kabupaten Tasikmalaya. Pemerintah dan masyarakat harus memiliki tujuan dan bersinergi dalam meningkatkan tempat wisata agar tempat wisata di Kabupaten Tasikmalaya menjadi lebih maju.

4. Sektor pertanian

Pemerintah hendaknya lebih meningkatkan lagi teknologi dan membuka lahan baru untuk petani, agar produksi petani menjadi lebih banyak dan dapat bersaing dengan daerah lainnya khususnya di Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, L. (2014), Analisis Model Kebijakan Kerjasama Pemerintah Swasta Dalam Pembangunan Infrastruktur. LIPI Press, Jakarta.

Ariefianto, M. D. (2012), EKONOMETRIKA Esensi dan Aplikasi Dengan Menggunakan Eviews. Erlangga, Jakarta.

Elita, D. (2002), "Identifikasi Sumber-sumber PAD dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah", Digilib USU.

Elmi, B. (2002), Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia. Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Fauji, Z. (2017), "Pengaruh Belanja Bidang Infrastruktur, Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, dari http://www.digilib.unila.ac.id

Ghozali. (2001), Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Spss. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Hari, A. P. (2004), "Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan, dan PAD (Studi Kasus Kota/Kabupaten se Jawa-Bali)", ejournal.

Herman, J. (2014), "Implementasi Pembangunan Infratsruktur Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Daerah", eJournal Administrative Reform.

Jokosiswaya, Y. (2007), "Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus di Kabupaten Klaten", Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta.

Khalistyowati, E. K. (2017), "Analaisis Korelasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Dengan Infrastruktur Pembangunan Daerah", Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dari http://www.repository.uinjkt.ac.id

Kodoatie, R. J. (2005), Pengantar Manajemen Infrastruktur. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Kuncoro, M. (2012), Perencanaan Daerah, Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan. Salemba Empat, Jakarta.

Purpitasari, P. (2015), "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Alokasi Belanja Daerah", Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi.

Putro, N. S. (2011), Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, dari *http://www.eprints.undip.ac.id.*

Sitompul, R. (1996), Keuangan Negara. Erlangga, Jakarta.

Soamale, M. (2013), "Pengaruh Pendapatan ASli Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Studi Di Kabupaten Kepulauan Sula)", ejournal.

Subagya, A. (2017), Mekanisme dan Implementasi Otonomi Daerah, Diambil 20 Maret 2018, dari *arupa.or.id: www.arupa.or.id*

Sukirno. (2004), Komunikasi Bisnis. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Suradinata, E. (1998), "Manajeman Pemerintah dan Otonomi Daerah", Bandung: Ramadan.

Susanto. (2005), "Kontribusi PAD Terhadap Besarnya Belanja Pembangunan Daerah", e-journal.

Widarjono, A. (2013), Ekonometrika Teori dan Aplikasi. UPP STIM YKPN, Yogyakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, *Tentang Mengatur Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, Tentang Retribusi Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tasikmalaya.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Tasikmalaya.

Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK), dari http://www.djpk.kemenkeu.go.id

LAMPIRAN

Lampiran I

Data PAD, Pembangunan Infrastruktur Kesehatan, Pembangunan Infrastruktur Jalan, Pembangunan Infrastruktur Pariwisata, Dan Pembangunan Infrastruktur Pertanian (Rupiah)

Tahun(Triwulan)	PAD (Rp)	Kesehatan (Rp)	Jalan (Rp)	Pariwisata(Rp)	Pertanian (Rp)
2011 (Tw 1)	7,912,228,751	119,388,003	705,459,000	46,919,418	195,457,011
2011 (Tw 2)	29,164,373,610	484,723,778	4,232,212,027	200,285,000	607,979,569
2011 (Tw 3)	45,864,000,000	8,367,007,645	23,296,251,831	575,747,215	5,453,386,218
2011 (Tw 4)	51,161,000,000	26,146,912,408	24,457,395,957	1,407,394,463	7,456,788,588
2012 (Tw 1)	10,957,000,000	474,699,278	2,484,084,783	13,500,000	546,166,493
2012 (Tw 2)	36,530,000,000	5,210,239,283	20,037,813,454	501,177,153	1,033,993,043
2012 (Tw 3)	49,901,000,000	13,851,469,492	40,674,272,878	489,472,090	2,840,089,274
2012 (Tw 4)	60,971,000,000	44,210,650,404	45,212,125,717	3,136,512,059	11,149,746,131
2013 (Tw 1)	14,129,000,000	17,458,587	1,661,170,852	26,172,887	491,872,000
2013 (Tw 2)	42,137,090,000	8,366,339,883	21,473,431,678	374,181,562	2,052,665,788
2013 (Tw 3)	58,200,000,000	14,725,990,106	33,212,120,544	1,621,019,999	8,645,732,312
2013 (Tw 4)	70,474,000,000	46,247,092,279	45,506,215,327	5,528,259,721	38,249,210,425
2014 (Tw 1)	27,455,000,000	2,271,777,728	12,833,349,731	121,818,521	7,400,720,146
2014 (Tw 2)	87,500,000,000	6,685,846,039	33,400,060,185	784,802,359	14,100,060,197
2014 (Tw 3)	111,108,000,000	18,783,063,393	74,287,423,565	1,368,399,438	18,853,075,904
2014 (Tw 4)	154,255,000,000	57,415,233,633	79,516,861,163	2,483,365,845	38,249,210,425
2015 (Tw 1)	100,108,238,000	1,977,277,290	2,920,170,000	67,618,600	65,235,000
2015 (Tw 2)	159,280,000,000	4,047,116,924	35,518,031,165	417,894,639	2,596,705,567
2015 (Tw 3)	142,024,250,285	10,662,450,711	52,663,010,395	853,278,155	9,168,807,066
2015 (Tw 4)	186,487,256,315	82,611,040,300	66,520,644,074	6,020,142,202	59,000,505,101
2016 (Tw 1)	140,020,922,441	21,000,000	3,559,650,945	92,435,000	930,377,131
2016 (Tw 2)	179,021,000,000	23,633,054,902	37,081,610,271	686,993,538	23,829,207,803
2016 (Tw 3)	216,227,321,380	65,547,537,657	41,785,770,596	1,100,971,689	38,839,123,495
2016 (Tw 4)	200,013,309,925	164,852,659,637	52,493,490,459	2,707,513,478	73,614,728,202

Sumber data : BAPPEDA, DPPKAD, dan DJPK

Lampiran II

Uji Akar Unit Root pada Residual pada Tingkat Level

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)
Series: PAD, KESEHATAN, JALAN, PARIWISATA,
PERTANIAN

Date: 04/10/18 Time: 23:40
Sample: 2011Q1 2016Q4
Exogenous variables: Individual effects
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
Total (balanced) observations: 115
Cross-sections included: 5

Method	Statistic	Prob.**
PP - Fisher Chi-square	36.6688	0.0001
PP - Choi Z-stat	-3.31178	0.0005

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Intermediate Phillips-Perron test results UNTITLED

Series	Prob.	Bandwidth	Obs
PAD	0.7132	0.0	23
KESEHATAN	0.3723	1.0	23
JALAN	0.0061	8.0	23
PARIWISATA	0.0001	12.0	23
PERTANIAN	0.0888	0.0	23

Lampiran III

Uji Akar Unit Root pada Residual pada Tingkat First Difference

Null Hypothesis: Unit root (individual unit root process)
Series: PAD, KESEHATAN, JALAN, PARIWISATA, PERTANIAN

Date: 04/10/18 Time: 23:40
Sample: 2011Q1 2016Q4
Exogenous variables: Individual effects
Newey-West automatic bandwidth selection and Bartlett kernel
Total (balanced) observations: 110
Cross-sections included: 5

Method	Statistic	Prob.**
PP - Fisher Chi-square	265.968	0.0000
PP - Choi Z-stat	-14.7614	0.0000

** Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi-square distribution. All other tests assume asymptotic normality.

Intermediate Phillips-Perron test results D(UNTITLED)

Series	Prob.	Bandwidth	Obs
D(PAD)	0.0000	21.0	22
D(KESEHATAN)	0.0003	7.0	22
D(JALAN)	0.0000	10.0	22
D(PARIWISATA)	0.0000	10.0	22
D(PERTANIAN)	0.0000	21.0	22

Lampiran IV

Uji Kointegrasi

Date: 04/10/18 Time: 23:42
Sample (adjusted): 2011Q3 2016Q4
Included observations: 22 after adjustments

Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: PAD KESEHATAN JALAN PARIWISATA PERTANIAN
Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Trace Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.800573	92.54224	69.81889	0.0003
At most 1 *	0.623646	57.07146	47.85613	0.0054
At most 2 *	0.583553	35.57251	29.79707	0.0097
At most 3 *	0.410842	16.30059	15.49471	0.0377
At most 4 *	0.190935	4.661266	3.841466	0.0308

Trace test indicates 5 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized No. of CE(s)	Eigenvalue	Max-Eigen Statistic	0.05 Critical Value	Prob.**
None *	0.800573	35.47078	33.87687	0.0320
At most 1	0.623646	21.49895	27.58434	0.2472
At most 2	0.583553	19.27192	21.13162	0.0892
At most 3	0.410842	11.63932	14.26460	0.1249
At most 4 *	0.190935	4.661266	3.841466	0.0308

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
* denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
**MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):

PAD	KESEHATAN	JALAN	PARIWISATA	PERTANIAN
-1.92E-13	-7.19E-11	2.74E-11	1.84E-09	-1.72E-10
-3.69E-12	8.46E-11	-9.33E-11	-5.17E-12	3.60E-11
-5.96E-12	-1.62E-10	3.64E-12	-5.38E-10	1.27E-10
3.38E-12	1.66E-10	7.89E-12	-6.50E-10	-1.97E-10
3.44E-11	-1.82E-10	-2.48E-11	1.77E-09	-1.02E-10

Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):

D(PAD)	-1.11E+10	-3.39E+09	8.66E+09	-5.03E+09	2.71E+09
D(KESEHATAN)	-2.36E+10	2.57E+09	3.86E+09	8.31E+09	3.30E+09
D(BINAMARGA)	-9.39E+09	6.11E+09	7.39E+09	1.82E+09	2.29E+09
D(PARIWISATA)	-7.28E+08	-4.17E+08	6.38E+08	6.88E+08	2.41E+08
D(PERTANIAN)	-1.00E+10	3.75E+08	1.35E+09	5.07E+09	3.74E+09

1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -2642.312

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

PAD	KESEHATAN	JALAN	PARIWISATA	PERTANIAN

1.000000	374.2694	-142.7118	-9565.782	895.2717
	(188.386)	(66.8666)	(1370.82)	(184.836)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(PAD)	0.002135
	(0.00083)
D(KESEHATAN)	0.004537
	(0.00099)
D(JALAN)	0.001804
	(0.00072)
D(PARIWISATA)	0.000140
	(7.9E-05)
D(PERTANIAN)	0.001928
	(0.00064)

2 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -2631.563

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

PAD	KESEHATAN	JALAN	PARIWISATA	PERTANIAN
1.000000	0.000000	15.57999	-551.0012	42.49715
		(6.21501)	(120.616)	(15.1997)
0.000000	1.000000	-0.422935	-24.08634	2.278504
		(0.16399)	(3.18263)	(0.40107)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(PAD)	0.014655	0.511889
	(0.01556)	(0.46772)
D(KESEHATAN)	-0.004960	1.915811
	(0.01893)	(0.56884)
D(JALAN)	-0.020752	1.192465
	(0.01257)	(0.37768)
D(PARIWISATA)	0.001680	0.017007
	(0.00148)	(0.04436)
D(PERTANIAN)	0.000543	0.753458
	(0.01221)	(0.36706)

3 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -2621.927

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

PAD	KESEHATAN	JALAN	PARIWISATA	PERTANIAN
1.000000	0.000000	0.000000	3784.348	-377.9532
			(551.285)	(59.0876)
0.000000	1.000000	0.000000	-141.7740	13.69208
			(20.2457)	(2.16997)
0.000000	0.000000	1.000000	-278.2640	26.98657
			(41.7923)	(4.47936)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(PAD)	-0.036930	-0.894071	0.043357
	(0.02503)	(0.70230)	(0.34732)
D(KESEHATAN)	-0.027934	1.289654	-0.873507
	(0.03523)	(0.98857)	(0.48890)
D(JALAN)	-0.064789	-0.007767	-0.800742
	(0.01974)	(0.55388)	(0.27392)
D(PARIWISATA)	-0.002124	-0.086680	0.021310

	(0.00255)	(0.07159)	(0.03541)	
D(PERTANIAN)	-0.007500	0.534232	-0.305285	
	(0.02305)	(0.64667)	(0.31981)	

4 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -2616.107

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)

PAD	KESEHATAN	JALAN	PARIWISATA	PERTANIAN
1.000000	0.000000	0.000000	0.000000	55.31373
				(14.9071)
0.000000	1.000000	0.000000	0.000000	-2.539515
				(0.48614)
0.000000	0.000000	1.000000	0.000000	-4.871652
				(1.01472)
0.000000	0.000000	0.000000	1.000000	-0.114489
				(0.01065)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)

D(PAD)	-0.053935	-1.726280	0.003674	-21.79699
	(0.02588)	(0.85485)	(0.32460)	(6.72412)
D(KESEHATAN)	0.000156	2.664395	-0.807955	-50.88611
	(0.03537)	(1.16819)	(0.44357)	(9.18875)
D(JALAN)	-0.058651	0.292661	-0.786417	-22.44610
	(0.02161)	(0.71367)	(0.27099)	(5.61358)
D(PARIWISATA)	0.000203	0.027217	0.026741	-2.126442
	(0.00247)	(0.08164)	(0.03100)	(0.64214)
D(PERTANIAN)	0.009629	1.372566	-0.265310	-22.46629
	(0.02347)	(0.77524)	(0.29436)	(6.09787)

Lampiran V

Uji Error Correction Model pada Tingkat Level

Null Hypothesis: ECT has a unit root
Exogenous: Constant
Bandwidth: 1 (Newey-West automatic) using Bartlett kernel

		Adj. t-Stat	Prob.*
Phillips-Perron test statistic		-4.622470	0.0015
Test critical values:	1% level	-3.769597	
	5% level	-3.004861	
	10% level	-2.642242	

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Residual variance (no correction)	1.10E+21
HAC corrected variance (Bartlett kernel)	1.11E+21

Phillips-Perron Test Equation
Dependent Variable: D(ECT)
Method: Least Squares
Date: 04/10/18 Time: 23:41
Sample (adjusted): 2011Q3 2016Q4
Included observations: 22 after adjustments

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
ECT(-1)	-1.083061	0.234371	-4.621138	0.0002
C	75825176	7.43E+09	0.010208	0.9920

R-squared	0.516382	Mean dependent var	-2.25E+09
Adjusted R-squared	0.492201	S.D. dependent var	4.88E+10
S.E. of regression	3.48E+10	Akaike info criterion	51.46785
Sum squared resid	2.42E+22	Schwarz criterion	51.56704
Log likelihood	-564.1463	Hannan-Quinn criter.	51.49121
F-statistic	21.35492	Durbin-Watson stat	1.886783
Prob(F-statistic)	0.000165		

Lampiran VI

Uji Penyembuhan Autokorelasi Dengan Diferensi Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	2.351031	Prob. F(2,16)	0.1273

Obs*R-squared	5.223993	Prob. Chi-Square(2)	0.0734

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 04/11/18 Time: 00:39
Sample: 2011Q2 2016Q4
Included observations: 23
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.31E+09	4.35E+09	0.302393	0.7662
D(KESEHATAN)	0.145228	0.313414	0.463374	0.6493
D(JALAN)	0.054628	0.211637	0.258121	0.7996
D(PARIWISATA)	0.407976	4.062160	0.100433	0.9212
D(PERTANIAN)	-0.624681	0.714387	-0.874429	0.3948
RESID(-1)	-0.394073	0.258202	-1.526218	0.1465
RESID(-2)	0.427773	0.343119	1.246718	0.2304

R-squared	0.227130	Mean dependent var	-1.99E-06
Adjusted R-squared	-0.062696	S.D. dependent var	1.92E+10
S.E. of regression	1.98E+10	Akaike info criterion	50.49695
Sum squared resid	6.24E+21	Schwarz criterion	50.84254
Log likelihood	-573.7149	Hannan-Quinn criter.	50.58386
F-statistic	0.783677	Durbin-Watson stat	1.984369
Prob(F-statistic)	0.595058		